

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN  
PENGANGGURAN DI KABUPATEN NABIRE  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**Jean Marzel Ngantung<sup>1)</sup>, A Jumat Fimbay B<sup>2)</sup>, Yerry Lukas Tabuni<sup>3)</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Satya Mandala, Nabire

Email :

<sup>1)</sup>[marzelngantung1110@gmail.com](mailto:marzelngantung1110@gmail.com) <sup>2)</sup>[ajumatfimbay@gmail.com](mailto:ajumatfimbay@gmail.com)

<sup>3)</sup>[yerrilukastabuni001@gmail.com](mailto:yerrilukastabuni001@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran terkait upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Nabire. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Kebijakan pemerintah Kabupaten Nabire dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Nabire dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu 1) tersedianya informasi melalui media terkait lapangan pekerjaan; 2) terciptanya pelatihan kerja bagi pengangguran; 3) pengawasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan semangat kewirausahaan; Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu Pemerintah Kabupaten Nabire perlu serius dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Nabire dengan mempersiapkan upaya, strategi dan langkah konkrit mengatasi permasalahan pengangguran. Pemerintah Kabupaten Nabire mampu berkolaborasi dengan perusahaan, lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Nabire.

**Kata kunci** : Upaya Pemerintah, Pengangguran, Kabupaten Nabire

**ABSTRACT**

*This research aims to provide an overview of the government's efforts in tackling the unemployment problem in Nabire Regency. The results of the study show that: The policies of the Nabire Regency government in overcoming unemployment can be carried out through several forms, namely 1) the availability of information through media related to employment; 2) the creation of job training for the unemployed; 3) supervision related to improving the quality of education and entrepreneurial spirit. The suggestions that can be given by researchers are that the Nabire Regency Government needs to be serious in overcoming the unemployment problem in Nabire Regency by preparing concrete efforts, strategies and steps to overcome the unemployment problem. The Nabire Regency Government is able to collaborate with companies, educational institutions and/or training institutions in creating jobs so as to reduce the unemployment rate in Nabire Regency.*

**Keywords:** Government Efforts, Unemployment, Nabire Regency

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data Worldmeters, pada April 2019, Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa (3,49 % dari total populasi dunia). Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut menimbulkan dampak sekaligus permasalahan kependudukan di Indonesia. Salah satu permasalahan kependudukan yang tidak dapat dihindari adalah pengangguran. Pengangguran disebabkan karena meningkatnya tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu indikator di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran.

Tingkat pengangguran akan mengukur sejauhmana angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang disediakan tersebut. Meningkatnya angka pengangguran akan berdampak pula pada permasalahan kemiskinan, kriminalitas, dan keadaan ekonomi. Pada penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Franita, Riska (2016) bahwa pada negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi suatu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah karena dapat memberikan dampak pada keadaan ekonomi dan sosial suatu negara.

Merujuk pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire dikutip melalui Katalog Kabupaten Nabire Dalam Angka , disebutkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Nabire masih diangka 4.06% yang dimana masih banyak pengangguran di Kabupaten Nabire. Data tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Nabire. Pemerintah dituntut mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

## LANDASAN TEORI

Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III tahun 2003, upaya didefinisikan sebagai "usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya". Sementara itu, Poerwadarminta (2006) menjelaskan bahwa upaya merupakan usaha untuk menyampaikan maksud, akal, ikhtisar. Upaya juga dapat

diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Pengangguran Pengangguran merupakan salah satu masalah krusial dalam perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Sukirno (1994) menjelaskan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Sementara itu, Hasyim (2017) menyatakan bahwa pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat.

Adapun Nanga (2001) berpendapat bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan kondisi dimana individu yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, baik karena sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah mendapat pekerjaan namun belum memulainya. Pengangguran menjadi permasalahan penting karena berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak terlepas dari perannya sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan publik. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk di dalamnya masalah pengangguran. Kebijakan tersebut dapat berupa regulasi, distribusi sumber daya, ataupun tindakan langsung untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja.

Salah satu teori yang relevan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah teori Keynes. Keynes (1936) berpendapat bahwa pengangguran terjadi karena permintaan agregat yang tidak mencukupi dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan permintaan agregat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain peningkatan

belanja pemerintah, pemotongan pajak, atau penurunan suku bunga untuk menstimulasi investasi.

Selain itu, teori modal manusia (human capital theory) juga menjadi landasan penting dalam upaya mengatasi pengangguran. Schultz (1961) dan Becker (1964) mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks ini, upaya pemerintah dapat diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan program pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi kepada angkatan kerja.

Dengan menambahkan perspektif teoritis tersebut, landasan teori dalam penelitian ini menjadi lebih kuat dan komprehensif. Kita dapat melihat bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran memiliki dasar pemikiran yang jelas, baik dari segi peran pemerintah, kebijakan ekonomi makro, maupun pengembangan sumber daya manusia. Teori-teori ini akan membantu kita dalam menganalisis dan mengevaluasi efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dalam konteks yang lebih luas.

## **PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Pengangguran Di Kabupaten Nabire.**

Permasalahan Pengangguran di Kabupaten Nabire Mengutip data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire bahwa pada per Tahun 2024, Perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah total angkatan kerja / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nabire adalah sebesar 4,06%. Capaian angka 4,06% tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang dimana capaian angkanya 3,45%. Salah satu factor yang turut memengaruhi masalah pengangguran masih terjadi di Kabupaten Nabire adalah penyerapan tenaga kerja.

### **Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Nabire**

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Nabire, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Nabire sebagaimana telah diuraikan. Berikut merupakan analisa yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire agar angka pengangguran di Kabupaten Nabire dapat teratasi secara lebih baik :

1. Pemerintah Kabupaten Nabire perlu menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan diberbagai media. Lapangan pekerjaan disediakan oleh pemerintah untuk

menyerap angkatan kerja atau lulusan sekolah/ universitas agar tidak menganggur. Lapangan kerja yang disediakan bisa dilakukan dengan menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan angkatan kerja yang banyak. Tentunya, pemetaan para pencari kerja perlu dilakukan dengan rinci agar lapangan kerja yang tersedia bisa seimbang dan memenuhi kebutuhan pencari kerja.

2. Pemerintah perlu membuat pelatihan kerja secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan, jika perlu program tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat pencari kerja namun rutin diprogramkan sejak pencari kerja tersebut masih berada di bangku sekolah/universitas. Pelatihan bisa diselenggarakan dengan kerjasama dengan lembaga pelatihan/pendidikan yang ada di lingkungan penduduk tersebut. Pelatihan kerja cenderung lebih dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik sehingga tidak memiliki keterampilan atau keahlian dalam bekerja. Sama halnya telah disampaikan oleh Franita Riska (2016) bahwa tujuan dari pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah adalah agar pencari kerja memiliki keterampilan sehingga bisa mandiri. Dalam hal ini lebih lanjut ditegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire perlu cepat tanggap dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan yang akan diselenggarakan kepada Masyarakat Kabupaten Nabire yang membutuhkan.
3. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu melakukan pengawasan dalam program peningkatan mutu Pendidikan dan Semangat kewirausahaan. Pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terkait dengan angka putus sekolah, atau anak yang tidak mampu bersekolah karena biaya pendidikan. Oleh karenanya Pemerintah perlu hadir untuk memberikan akses pendidikan gratis sebagai upaya pemenuhan penekanan angka pengangguran di Kabupaten Nabire. Hal lain yaitu, Pemerintah perlu meningkatkan semangat kewirausahaan bagi Masyarakat Kabupaten Nabire. Mengingat, tidak semua orang senang dan berbakat melakukan pekerjaan kantor. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu memfasilitasi masyarakat yang memiliki semangat kewirausahaan sehingga kelompok tersebut bisa memperoleh lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah.

Berbagai upaya yang disampaikan penulis tersebut memerlukan perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Nabire dalam penerapannya sehingga Pemerintah Kabupaten nabire melalui Dinas Tenaga Kerja dapat menyeimbangi tersedianya lapangan pekerjaan dengan

pencari kerja yang ada. Pemerintah perlu cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Nabire mengingat jumlah penduduk yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila masalah pengangguran dapat teratasi maka keadaan ekonomi masyarakat bisa semakin membaik dan masyarakat bisa lebih berkualitas dan mandiri dalam berproduksi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Nabire dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu: 1) tersedianya informasi melalui media terkait lapangan pekerjaan; 2) terciptanya pelatihan kerja bagi pengangguran; 3) pengawasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan semangat kewirausahaan;

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Franita, Riska. 2016. Analisis Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)* Volume 1 Desember 2016 ISSN 2541-657x diakses pada <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97>.
- Hermuningsih, Sri (2005). Upaya Mengatasi Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Economica Kajian Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Volume 1 Nomor 1 Agustus 2005. ISSN: 1858-2648
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.